

NASKAH PUBLIKASI

**PERAN APIB (ARTICULAÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS DO BRASIL)
DALAM MENGATASI PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA
AKIBAT DEFORESTASI PADA MASYARAKAT ADAT DI BRASIL**

***THE ROLE OF APIB (ARTICULAÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS DO
BRASIL) TO TACKLE HUMAN RIGHTS VIOLATIONS DUE TO
DEFORESTATION TOWARDS INDIGENOUS PEOPLE IN BRAZIL***

¹LA ODE KASBAR, ²M. DZIQUIE AULIA AL FARAUQI



OLEH:

**LA ODE KASBAR
1811102434023**

**PRODI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS EKONOMI BISNIS DAN POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR**

2022

Naskah Publikasi

Peran APIB (Articulação dos Povos Indígenas do Brasil) dalam Mengatasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia Akibat Deforestasi pada Masyarakat Adat di Brasil

The Role of APIB (Articulação dos Povos Indígenas do Brasil) to Tackle Human Rights Violations Due to Deforestation towards Indigenous People in Brazil

¹La Ode Kasbar, ²M. Dziqie Aulia Al Farauqi



Oleh:

**La Ode Kasbar
1811102434023**

**PRODI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS EKONOMI BISNIS DAN POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR**

2022

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERAN APIB (ARTICULAÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS DO BRASIL)
DALAM MENGATASI PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA
AKIBAT DEFORESTASI PADA MASYARAKAT ADAT DI BRASIL**

Naskah Publikasi

Diajukan oleh

La Ode Kasbar
1811102434023

Telah disetujui oleh
Pada hari / tanggal, Senin / 27 Juni 2022

Menyetujui,
Pembimbing



M. Dziqie Aulia Al Farauqi, S.IP., M.A
NIDN. 1103099101

HALAMAN PENGESAHAN

**PERAN APIB (ARTICULAÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS DO BRASIL)
DALAM MENGATASI PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA
AKIBAT DEFORESTASI PADA MASYARAKAT ADAT DI BRASIL**

Naskah Publikasi

Diajukan oleh

La Ode Kasbar
1811102434023

Telah disetujui oleh

Pada hari/tangga, Kamis / 30 Juni 2022

Pembimbing I,



M. Dziaqe Aulia Al Farauqi, S.IP., M.A
NIDN. 1103099101

Penguji I,



Khoirul Amin, S.IP., M.A
NIDN. 1115119001

Dekan FEBP




Drs. M. Farid Wajdi, M.M., Ph.D
NIDN. 0605056501

Ketua Program Studi HI




Khoirul Amin, S.IP., M.A
NIDN. 1115119001

PERAN APIB (ARTICULAÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS DO BRASIL) DALAM MENGATASI PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA AKIBAT DEFORESTASI PADA MASYARAKAT ADAT DI BRASIL

La Ode Kasbar

Program Studi Hubungan Internasional/Fakultas Ekonomi Bisnis dan Politik
Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

kasbarlaode@gmail.com

Abstrak

Laju deforestasi di Brasil mengalami peningkatan akibat dari kulminasi kebijakan-kebijakan Presiden Brasil Jair Bolsonaro yang cenderung mengabaikan kelestarian hutan Amazon dan sekitarnya. Peningkatan ini tidak hanya berkontribusi dalam memperparah perubahan iklim secara global atau kerusakan lingkungan. Tetapi juga, berimplikasi pada keberlangsungan kehidupan masyarakat adat yang menggantungkan hidupnya pada hutan dan tak jarang masyarakat adat juga harus menghadapi ancaman kekerasan. Keterbatasan akses terhadap pengambilan keputusan menyebabkan masyarakat adat sulit untuk memperoleh hak-haknya. Sehingga perlu adanya bantuan dari lembaga atau organisasi yang secara khusus memperjuangkan hak-hak masyarakat adat seperti organisasi APIB atau Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis untuk membuktikan APIB sebagai Masyarakat Sipil Global dan perannya dalam mengatasi pelanggaran hak asasi manusia akibat deforestasi, terutama membantu memperjuangkan hak-hak masyarakat adat di Brasil. Adapun konsep yang digunakan yaitu Global Civil Society atau GCS sebagai alat analisis untuk menjelaskan organisasi APIB yang merupakan organisasi nasional non-pemerintah sebagai Masyarakat Sipil Global dan perannya dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat adat. Penelitian ini menggunakan metode tinjauan literatur yaitu dengan mengumpulkan data dari buku, jurnal dan penelitian sebelumnya yang relevan. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa bahwa APIB diidentifikasi sebagai Gerakan Masyarakat Sipil Global sesuai dengan menggunakan indikator-indikator yang terdapat dalam konsep tersebut. Peran APIB dalam mengatasi pelanggaran hak asasi manusia masyarakat adat di Brasil akibat deforestasi yaitu dengan menyediakan kebutuhan hukum bagi masyarakat adat, memobilisasi masyarakat adat dan organisasi di Brasil untuk melawan ancaman dan penyerangan terhadap hak-hak adat serta membentuk aliansi dengan organisasi pribumi di negara lain.

Kata kunci: Peran APIB, Deforestasi, Hak asasi manusia, Masyarakat adat Brasil

Abstract

The rate of deforestation in Brazil has increased as a result of the culmination of the policies of Brazilian President Jair Bolsonaro which tend to ignore the sustainability of the Amazon forest and its surroundings. This increase will not only contribute to aggravating global climate change or environmental damage. But also, it has implications for the sustainability of the lives of indigenous peoples who depend on forests for their lives and not infrequently indigenous peoples also have to face the threat of violence. Limited access to decision-making makes it difficult for indigenous peoples to obtain their rights. So there is a need for assistance from institutions or organizations that specifically fight for the rights of indigenous peoples, such as the APIB organization or Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Therefore, this study will analyze to prove APIB as a Global Civil Society and its role in overcoming human rights violations due to deforestation, especially helping to fight for the rights of indigenous peoples in Brazil. The concept used is the Global Civil Society or GCS as an analytical tool to explain the APIB organization which is a non-governmental national organization as a Global Civil Society and its role in fighting for the interests of indigenous peoples. This study uses a literature review method, namely by collecting data from relevant books, journals and previous research. This study resulted in the finding that APIB was identified as a Global Civil Society Movement in accordance with the indicators contained in the concept. APIB's role in addressing human rights violations of indigenous peoples in Brazil due to deforestation is by providing legal needs for indigenous peoples, mobilizing indigenous peoples and organizations in Brazil to fight threats and attacks on indigenous rights and forming alliances with indigenous organizations in other countries.

Keywords: Role of APIB, Deforestation, Human rights, Indigenous peoples of Brazil

Pendahuluan

Brazil adalah rumah bagi salah satu hutan terbesar di dunia, misalnya hutan Amazon. Brazil juga membuat kemajuan penting melawan deforestasi ilegal di akhir tahun 2000-an. Pada tahun 2012, laju deforestasi turun sebesar 84% dibandingkan dengan puncak tahun 2004.¹ Namun sejak 2004, laju deforestasi kembali meningkat pada periode Agustus 2020 hingga Juli 2021.² Deforestasi meningkat sebesar 22% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dan

¹ Silva Junior et al, "The Brazilian Amazon Deforestation Rate in 2020 is the Greatest of the Decade" dalam *In Nature Ecology and Evolution*, Vol. 5, No. 2 (2021), h. 144-145.

² Silva Junior, 2021.

merupakan yang tertinggi sejak 15 tahun.³ Pada tahun 2020, kasus kebakaran hutan diidentifikasi hampir 223.000 kejadian dan dilaporkan angka tertinggi terjadi dalam satu dekade.⁴ Laju deforestasi yang terjadi saat ini menjadikan Amazon berada pada ambang perubahan penyerap karbon bersih. Peningkatan laju deforestasi tersebut disebabkan oleh kebijakan presiden Jair Bolsonaro terhadap Amazon dan sekitarnya berorientasi pada ekonomi dan agrikultural. Akibat deforestasi dan perluasan padang rumput untuk keperluan produksi daging sapi, lahan pertanian yang dipergunakan untuk kedelai dan minyak sawit, dan semakin meningkatnya aktivitas konversi hutan primer menjadi hutan yang dialihfungsikan sebagai hutan tanaman untuk pembuatan kertas dan ampas kertas menjadi pendorong utama deforestasi yang berimplikasi pada kerusakan penyerapan karbon bersih dan lingkungan.

Selain itu, kelompok masyarakat adat Amazon juga menghadapi dampak buruk akibat aktivitas deforestasi tersebut. Hal ini menjadikan masyarakat adat Amazon sangat rentan terhadap ancaman perenggutan atas hak tanah dan kepemilikan terhadap tanah mereka karena ketergantungan mereka pada sumber daya alam yang disediakan oleh hutan hujan Amazon. Bahkan ancaman kekerasan juga menjadi dampak yang harus dihadapi oleh kelompok masyarakat adat Brasil. Namun meskipun demikian, kelompok-kelompok ini seringkali memiliki akses terbatas pada pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perubahan iklim, meskipun merekalah yang paling menderita dari dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim tersebut. Emisi dari deforestasi dan degradasi hutan secara drastis lebih tinggi dalam beberapa abad terakhir, hal ini menyisakan kelompok-kelompok pribumi di Amazon harus menanggung derita tersebut. Oleh karena itu, dengan adanya peran organisasi atau lembaga yang memperjuangkan kepentingan hak-hak masyarakat adat menjadi sangat penting bagi mereka, seperti organisasi non-pemerintah APIB (*Articulação dos Povos Indígenas do Brasil*) atau Artikulasi Masyarakat Adat Brasil. kelompok APIB memperjuangkan hak-hak masyarakat adat dari kerusakan lingkungan akibat deforestasi yang dapat

³ Silva Junior, 2021.

memperparah perubahan iklim. Hal ini dinilai karena masyarakat adat sangat bergantung pada ekosistem yang di sediakan Amazon, sehingga kerusakan seperti perubahan iklim, pemanasan global, dan pengundulan hutan di kawasan tertentu dianggap dapat mengganggu hak masyarakat adat atas mereka.

Tinjauan Pustaka

Dalam mengkaji peran APIB dalam mengatasi pelanggaran hak asasi manusia akibat deforestasi yang terjadi Brasil, peneliti melakukan kajian pustaka dengan merujuk dan menggunakan berbagai sumber referensi dan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Pertama bersumber dari jurnal yang ditulis oleh Maryuri Mora & Arquias Sófocles, membahas mengenai peran Angela Amankawa Kaxuyana atau AAK selaku koordinator COIAB (*Coordenação das Organizações dos Indígenas da Amazônia Brasileira* atau Komite Koordinasi Organisasi Masyarakat Adat Amazon Brasil) yang merupakan organisasi anggota dari APIB.⁵ Jurnal ini menjelaskan bahwa peran AAK yaitu melakukan kampanye di Eropa agar suara masyarakat adat didengar dan mengecam pelanggaran hak-hak masyarakat adat dan peningkatan aksi deforestasi. Selain itu, peran dari COIAB dan APIB yaitu menyediakan dan mengurus semua kebutuhan hukum masyarakat adat. Mengenai bantuan hukum, laporan tahunan APIB dan Amazon Watch, membahas dari konteks yang lain yaitu bagaimana jaringan lembaga keuangan internasional terkait dengan konflik di tanah adat, deforestasi ilegal, perampasan tanah, melemahnya perlindungan lingkungan, dan konflik produksi dan ekspor komoditas.⁶ Dalam hal ini, peran APIB, Amazon Watch, dan koalisi sekutu Brasil menyerukan kepada pelaku pasar terkemuka untuk berhenti melakukan tindakan mereka. Selain itu, pengacara adat dan penasihat hukum APIB menjadi tim pembela hukum garis depan di Brasil. Mengenai peran APIB, penelitian Emilia Hallstrom, dalam penelitiannya

⁵ Maryuri Mora Grisales & Arquias Sofocles, "Being a Leader, a Woman and Indigenous: Three Challenges, Three Barriers", dalam *International Journal on Human Rights*, Vol. 17, No. 30, (2020), h. 19-26.

⁶ APIB & Amazon Watch, "Complicity in Destruction III: How Global Corporations Enable Violations of Indigenous Peoples' Rights in the Brazilian Amazon", dalam *annual report of APIB*, 2020.

mengambil studi kasus perjanjian EU-Mercosur.⁷ Peran APIB dalam hal ini yaitu membangun aliansi dan menggunakan framing untuk memperjuangkan kepentingan kelompok masyarakat adat, terutama melindungi hak-hak masyarakat adat dan pelestarian Amazon Brasil. Upaya framing juga ditemukan pada penelitian lain oleh Camila Emboava dan Annika Egan, namun konteks permasalahannya berfokus pada iklim politik di masa pemerintahan presiden Bolsonaro yang menyangkut perjuangan masyarakat adat atas tanah mereka. APIB dan Radio Yandê memanfaatkan media untuk membuat klaim tegas tentang hak tanah atau ketergantungan mereka dengan tanah dan alam.⁸

Secara umum, penelitian-penelitian di atas membahas mengenai peran APIB dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat adat dan melindungi hutan hujan Amazon dan sekitarnya akibat demarkasi tanah dan deforestasi yang disebabkan oleh iklim politik Bolsonaro, masuknya jaringan keuangan internasional di kawasan tanah adat, kemudian perjanjian EU-Mercosur yang juga dinilai tidak memberikan dampak lingkungan yang berkelanjutan di tanah masyarakat adat. Peran APIB yang ditemukan dalam penelitian di atas memberikan tambahan referensi bagi penelitian ini. Namun, di penelitian ini akan menguraikan peran APIB dengan konteks yang berbeda yang berfokus pada masa pemerintahan Bolsonaro. Hal ini dikarenakan terdapat banyak kebijakan di masa pemerintahan Bolsonaro yang akan diuraikan dalam penelitian ini mendorong tingginya laju deforestasi di hutan Amazon Brasil yang kemudian mengancam hak-hak masyarakat adat yang tercantum dalam Deklarasi PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) dan Konvensi ILO (International Labour Organisation) No. 169. Dengan perbedaan konteks yang ada dalam melihat dan menekankan pada peran APIB dalam mengatasi pelanggaran hak asasi manusia bagi masyarakat adat akibat deforestasi di masa pemerintahan Bolsonaro dengan menggunakan pisau

⁷ Emilia Hallstrom, "Indigenous Interest in International Trade Governance: A Case Study of APIB and the EU-Mercosur Trade Agreement". *Tesis*. (International Relations, Department of Global Political Studies Bachelor Program, Malmo University, 2021).

⁸ Camila Emboava & Annika Egan, 'Old Power Struggles and New Media Work: Indigenous Peoples Striving for Justice in Contemporary Brazil, ' Dalam J. Díaz-Pont et al (eds.), *The Local and the Digital in Environmental Communication* (New York: Palgrave Macmillan, 2020), h. 173.

analisis konsep Masyarakat Sipil Global (*Global Civil Society*) dapat mengisi celah dari penelitian-penelitian sebelumnya.

Global Civil Society

Global civil society atau masyarakat sipil global merupakan salah satu kajian dalam studi ilmu hubungan internasional. Istilah *civil society* sendiri telah mengalami perbedaan makna dari waktu ke waktu. Bagi para pemikir modern awal, seperti Thomas Hobbes dan Locke mendefinisikan *civil society* sebagai sesuatu yang bertentangan dengan ‘*state of nature*’.⁹ Tidak ada perbedaan antara masyarakat sipil dan Negara yang dibentuk melalui kontrak sosial dan yang diatur oleh undang-undang.¹⁰ Pada abad ke-19, ahli teori politik seperti Hegel dan Thomas Paine, menarik perbedaan antara Negara dan masyarakat sipil. Menurut Hegel, masyarakat sipil terpisah dari sekaligus sebagai ranah perantara antara keluarga dan Negara. Definisi mengenai masyarakat sipil yang digagaskan oleh Hegel mencakup bidang ekonomi.¹¹ Dalam karyanya dengan tema besar *Civil Society*. Hegel menjelaskan bahwa masyarakat sipil sebagai gambaran antara konflik dan fragmentasi kepentingan-kepentingan ekonomi, agama, juga solidaritas kesukuan yang diorganisir dan diperjuangkan.

Definisi tersebut kembali dipersempit pada abad ke-20 oleh Antonio Gramsci. Menurut Gramsci masyarakat sipil adalah ranah budaya, ideologi dan perdebatan politik yang berada di luar negara, pasar dan keluarga.¹² Untuk waktu yang lama, gagasan mengenai masyarakat sipil terikat pada batas teritorial. Pada paruh kedua abad kedua puluh, seperti aspek-aspek lain dari lingkungan manusia, masyarakat sipil mulai mencapai dimensi global karena meningkatnya keterkaitan, meningkatnya perjalanan dan komunikasi. Munculnya internet dan globalisasi berikutnya setelah tahun 1990 telah membentuk masyarakat sipil pada postur yang jauh lebih mengglobal. Meskipun benar-benar salah untuk menganggap

⁹ Adrian Kastrati, “Civil Society from Historical to Contemporary Perspectives”, dalam *European Journal of Multidisciplinary Studies*, Vol. 1, No. 1, h. 64-68.

¹⁰ Mary Kaldor, “The Idea of Global Civil Society”, dalam *International Affairs*, Vol. 79, No. 3, (2003), h. 583-593.

¹¹ Neelmani Jaysawal, “Civil Society, Democratic Space, and Social Work”, dalam *Sage Open*, Vol. 3, No. 4, (2013), h. 1-12.

¹² Mary Kaldor, 2003.

masyarakat sipil global (gerakan, kelompok, organisasi, lembaga yang beroperasi di tingkat global) sebagai produk setelah paruh kedua abad kedua puluh, tetapi jumlah dan diskusi tentang merekalah yang telah berkembang. sejak pertengahan abad kedua puluh. Masyarakat sipil global dapat didefinisikan sebagai “sektor ketiga” di tingkat global, yang dibedakan dari sekaligus alternatif dari tatanan internasional yang berpusat pada negara dan jaringan pasar global.¹³

Anheier, Galsius dan Kaldor telah memberikan definisi deskriptif mengenai masyarakat sipil global, mereka mendefinisikan masyarakat sipil global sebagai:¹⁴

“the sphere of ideas, values, institutions, organisations, networks, and individuals located between the family, the state, and the market and operating beyond the confines of national societies, politics, and economies”.

Masyarakat sipil global terlibat dalam kegiatan yang: (a) *Addresses transworld issues*; (b) *involves transborder communication*; (c) *has a global organisation*; dan (d) *works on a premise of supranational*.¹⁵ Masyarakat sipil global berbeda dengan masyarakat sipil domestik dalam artian mereka hanya memiliki satu atau beberapa dari keempat karakteristik ini. Karena kepentingan dan nilai bersama mereka, kelompok dan organisasi yang berbeda serta warga negara dari negara yang berbeda menentang batas nasional mereka dan berkumpul untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan sosial, politik dan ekonomi di tingkat internasional dan dengan demikian menjadi bagian dari masyarakat sipil global. Komunitas epistemik masyarakat, jaringan advokasi transnasional, gerakan sosial, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah beberapa contoh dari masyarakat sipil global.

¹³ Neera Chandhoke, “The Limits of the Global Civil Society”, dalam *Global Civil Society Yearbook 2002*, diedit oleh Marlies Glasius, Mary Kaldor dan Helmut Anheier, (Oxford: Oxford University Press, 2002), h. 35-53.

¹⁴ Helmut Anheier, Marlies Glasius & Mary Kaldor. “*Global Civil Society 2001*”, (Oxford: Oxford University Press, 2001).

¹⁵ Jan Aart Scholte, “Global Civil Society: Changing the World”, dalam Working Paper, *Centre for the Study of Globalisation and Regionalisation (CSGR)*, (1999).

Metode Penelitian

Metodologi merupakan prinsip dasar yang diterapkan dalam penelitian yang akan dilakukan di mana peneliti harus menentukan metodologi yang sesuai dan kemudian menurunkannya dengan menentukan metode yang akan digunakan dalam penelitiannya. Metode sendiri merupakan cara yang akan digunakan dalam penelitian yang kemudian akan diuraikan secara lebih rinci mengenai penelitian yang diambil oleh peneliti.¹⁶

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif. Hal ini dikarenakan dalam Metode Penelitian Hubungan Internasional, penelitian deskriptif dapat dipahami sebagai sebuah jenis penelitian yang berupaya untuk menguraikan atau menjelaskan mengenai fenomena, gejala dan peristiwa yang sedang terjadi. Dengan menggunakan Jenis penelitian ini dimaksudkan agar peneliti dapat menggambarkan suatu gejala, peristiwa atau kejadian yang sedang atau telah terjadi. Dalam penelitian Hubungan Internasional yang dikutip dari buku yang berjudul Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi oleh Mohtar Mas' oed, bahwasanya penelitian deskriptif didefinisikan sebagai upaya dalam memahami suatu fenomena dengan menjawab pertanyaan siapa, apa, di mana, kapan, dan kapan.¹⁷ Dalam hal ini, penulis akan menggambarkan bagaimana peran APIB sebagai organisasi non-pemerintah dalam membantu memperjuangkan hak asasi manusia, terutama hak-hak masyarakat adat Brasil akibat deforestasi sebagai implikasi dari kebijakan-kebijakan Presiden Brasil Jair Bolsonaro.

Adapun teknik pengambilan data yang digunakan oleh penulis adalah teknik Tinjauan Literatur. Dalam hal ini, penulis melakukan collect data yang akan digunakan dalam penelitian ini melalui jurnal, artikel, maupun karya tulis yang dapat membantu penulis dalam memahami, menjelaskan serta memperoleh data yang relevan dengan penelitian penulis. Selain itu, Tinjauan Literatur digunakan sebagai bagian dari komponen pengumpulan data dan Teknik Analisis Data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif di mana data yang

¹⁶ Djoko Sulisty, "*Metode Kualitatif dan Kuantitatif dalam Perkuliahan Analisis Hubungan Internasional*", (Surabaya: Universitas Airlangga, 2015).

¹⁷ Mohtar Mas' oed, "*Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi*", (LP3ES, 1990).

diperoleh untuk menjelaskan penelitian ini berupa kumpulan kata-kata dan bukan berupa penjelasan yang berasal rangkaian angka-angka numerik.

Penulis juga menetapkan batasan masalah. Batasan masalah adalah ruang lingkup masalah atau upaya peneliti dalam membatasi ruang lingkup masalah yang akan diteliti. Hal ini dimaksudkan agar masalah tersebut tidak terlalu luas dan lebar sehingga penelitian ini fokus pada variabel-variabel yang akan diteliti. Dengan kata lain, pembatasan suatu masalah bertujuan untuk menghindari adanya distorsi maupun pelebaran pokok agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga penelitian dapat tercapai sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah menjelaskan atau mendeskripsikan mengenai implementasi pisau analisis berupa *Global Civil Society* dan menjelaskan peran APIB sebagai organisasi non-pemerintah di Brasil dalam mengadvokasi isu-isu pelanggaran hak asasi manusia, terutama pelanggaran yang disebabkan oleh aktivitas deforestasi sebagai implikasi dari kebijakan Bolsonaro.

Hasil dan Pembahasan

Masyarakat sipil global terlibat dalam kegiatan yang: (a) *Addresses transworld issues*; (b) *involves transborder communication*; (c) *has a global organisation*; dan (d) *works on a premise of supranational*. Masyarakat sipil global berbeda dengan masyarakat sipil domestik dalam artian mereka hanya memiliki satu atau beberapa dari keempat karakteristik ini. Karena kepentingan dan nilai bersama mereka, kelompok dan organisasi yang berbeda serta warga negara dari negara yang berbeda menentang batas nasional mereka dan berkumpul untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan sosial, politik dan ekonomi di tingkat internasional dan dengan demikian menjadi bagian dari masyarakat sipil global. Komunitas epistemik masyarakat, jaringan advokasi transnasional, gerakan sosial, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) adalah beberapa contoh dari masyarakat sipil global.

Adresses Transworld Issues

Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menjadi forum terdepan dalam menangani masalah-masalah lintas batas. Isu-isu lintas batas yang ditetapkan oleh

PBB mencakup kontrol persenjataan, perubahan iklim, standar-standar buruh, perlindungan budaya, pemberantasan kemiskinan, bantuan luar negeri, inklusi digital, ekuitas gender, HIV/AIDS, standar-standar buruh, pemberantasan kemiskinan, pengungsi, revivalisme agama dan perjanjian perdagangan. Termasuk didalamnya mempromosikan hak asasi manusia menjadi salah satu bagian yang menjadi tujuan inti yang ingin dicapai dalam PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) dan mendefinisikan identitasnya sebagai organisasi untuk orang-orang di seluruh dunia. Negara-negara anggota telah mengamanatkan Sekretaris Jendral dan PBB untuk mencapai standar yang ditetapkan dalam Piagam PBB dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR).¹⁸ Penghargaan terhadap hak asasi manusia merupakan tugas diamanatkan secara universal, tugas ini tidak hanya berfokus sebagai tugas pemerintah secara domestik saja melainkan tugas setiap masyarakat internasional termasuk didalamnya NGO (*Non-Governmental Organisation*), INGO (*International Non-Governmental Organisation*), IGO (*International Governmental Organisation*), Organisasi Internasional dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat).

Involves Transborder Communication

Indikator ini mengacu pada bagaimana suatu organisasi menjalin jaringan dan koneksi melewati batas yurisdiksi suatu negara. APIB sendiri merupakan kepanjangan dari *Articulacao dos Povos Indigenas do Brasil* (APIB) atau Artikulasi Masyarakat Adat Brasil dibentuk oleh pergerakan masyarakat adat di *Camp Terra Livre* (ATL) pada tahun 2005.¹⁹ APIB adalah contoh rujukan nasional gerakan pribumi di Brasil yang di buat secara *bottom-up*. APIB menyatukan organisasi regional masyarakat adat dan bertujuan untuk memperkuat kesatuan dalam masyarakat, mengartikulasikan berbagai wilayah dan organisasi adat di Brasil. Selain itu untuk memobilisasi masyarakat dan organisasi masyarakat adat untuk melawan ancaman dan agresi terhadap hak-hak adat.

¹⁸ United Nations, "Outwork-Human Rights" dalam <https://www.un.org/en/global-issues>, diakses pada 20 Juni 2022.

¹⁹APIB, "About-APIB" dalam <https://apiboficial.org>, diakses pada 20 Juni 2022.



Sumber. apiboficial.org

Saat ini keanggotan APIB terdiri dari seluruh wilayah Brasil melalui organisasi regional yang membentuknya, di antaranya COIAB, APOINME, Terena Council, Aty Guasu, Comissao Guatani Yvyrupa, ARPINSUDESTE serta ARPINSUL.²⁰ Melalui GATC (*The Global Alliance of Territorial Communities*) APIB membangun komunikasi dan membentuk aliansi dari komunitas lokal Amerika Latin, Afrika, dan Asia. Anggota komunitas ini terdiri dari AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara), AMPB (Aliansi Masyarakat dan Hutan Mesoamerika, COICA (Koordinator Organisasi Adat Lembah Amazon) dan REPALEAC (Jaringan Penduduk Asli dan Lokal untuk Pengelolaan Berkelanjutan Hutan Afrika Tengah).

Has a Global Organisation

Suatu lembaga atau organisasi dikatakan Masyarakat Sipil Global (GCS) apabila memiliki badan organisasi global yang merupakan representasi internasional yang mewakili organisasi domestik tertentu. COICA (*Coordinator of Indigenous Organizations of the Amazon River Basin*) merupakan organisasi payung yang mengadvokasi kepentingan organisasi adat di tingkat regional dan internasional. Sejak tahun 1992, masing-masing organisasi nasional masyarakat

²⁰ <https://apiboficial.org>, diakses pada 20 Juni 2022.

adat dari Bolivia, Peru, Ekuador, Kolombia, Brasil Venezuela, Suriname, Guyana, dan Prancis telah menjadi anggota COICA.²¹ COICA mengidentifikasi dirinya sebagai badan koordinasi internasional untuk organisasi anggotanya demi kepentingan semua masyarakat adat di wilayah Amazon dan merupakan representasi global dari APIB melalui COIAB (*The Coordination of Indigenous Organizations of the Brazilian Amazon*). APIB dalam hal ini diidentifikasi sebagai aglutinasi nasional organisasi non-pemerintah yang memperjuangkan hak-hak masyarakat adat di Brasil. Koordinasi APIB bersama COIAB dan COICA dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Sumber. coiab.org.br

Works on a Premise of Supranational Solidarity

Hal ini mengacu pada solidaritas yang tidak mengenal batas teritorial, seperti solidaritas yang menyatukan seseorang di suatu negara dengan seseorang di negara tertentu melalui persamaan kepercayaan agama. Dalam hal ini, solidaritas supranasional yang menghubungkan antara APIB dengan GATC karena memiliki kesamaan kepentingan berupa penghormatan dan perjuangan terhadap hak-hak masyarakat adat dan menciptakan solusi untuk mengatasi

²¹Climate Alliance. “About-COICA” dalam <https://www.climatealliance.org/indigenous-partners/coica.html>, diakses pada 20 Juni 2022.

perubahan iklim dan masalah biodiversitas. Oleh karena itu, keberadaan APIB sebagai organisasi nasional non-pemerintah diidentifikasi sebagai Masyarakat Sipil Global (GCS) dalam dunia internasional.

Peran APIB dalam Mengatasi Pelanggaran HAM

Mengenai peran APIB dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat adat Brasil merupakan salah satu bentuk mempromosikan hak asasi manusia sebagaimana yang ditetapkan dalam piagam PBB dan Universal Hak Asasi Manusia (UDHR). Bahkan jaminan hukum hak-hak masyarakat adat telah ditetapkan dalam Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 13 September 2007. Deklarasi ini merupakan instrumen paling komprehensif yang merinci hak-hak masyarakat adat dalam hukum dan kebijakan internasional yang memuat standar minimum untuk pengakuan, perlindungan dan pemajuan hak-hak masyarakat adat. Hak-hak substantif yang terkandung dalam deklarasi ini seperti *self-determination; rights to lands, territories and resources; economic, social and cultural rights; collective rights; equality and non-discriminations; rights in relations to treaties, agreements and other constructive arrangements between indigenous peoples and states; dan the status of the declaration under international law*.²² Selain itu, satu-satunya konvensi yang secara khusus mengatur hak-hak masyarakat adat ditetapkan dalam *ILO Convention concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries, 1989 No. 169*.

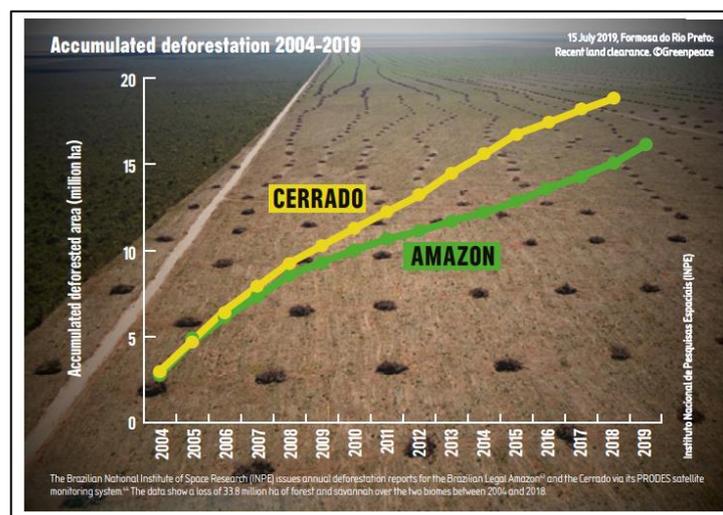
Identifikasi pelanggaran hak asasi manusia dapat dilihat dari dampak kebijakan-kebijakan Presiden Brasil Jair Bolsonaro. Seperti yang terjadi pada April 2019, di mana ia membubarkan Komite Antar Menteri untuk climate change atau perubahan iklim dan kelompok eksekutifnya, bersamaan dengan komisi REDD+ Nasional.²³ Selain itu, adanya kebijakan berupa pengalihan mandat dari Kementerian Lingkungan Hidup ke Kementerian Pertanian mengenai dinas

²² United Nation, "Indigenous Peoples and the United Nations Human Rights System", dalam <https://www.ohchr.org>, diakses pada 22 Juni 2022.

²³ Greenpeace, "*Under Fire*", dalam https://www.greenpeace.org/static/planet4-internationalstateless/2020/04/86b5fe06-greenpeace_underfire_artwork_pages.pdf, diakses pada 22 Juni 2022.

kehutanan Brasil. Hal ini menunjukkan adanya indikasi bahwa langkah kebijakan yang diambil oleh Bolsonaro lebih mementingkan kepentingan bisnis daripada konservasi atau kelestarian hutan Amazon.²⁴

Di sisi yang lain, kerja sama yang dijalin antara pemerintah Brasil dengan pelaku agribisnis telah menghasilkan kebijakan yang mengizinkan pemanfaatan dan perluasan hutan Amazon demi kepentingan ekonomi Negara.²⁵ Greenpeace mengindikasikan beberapa perusahaan multinasional yang berkaitan secara signifikan dengan pembukaan lahan hutan di Cerrado yaitu Amaggi Brazil, ADM, Bunge, Cargill, COFCO International dan Louis Dreyfus. Bahkan, adanya regulasi baru yang berkaitan dengan pengurangan hukuman bagi pelaku yang melakukan kejahatan lingkungan, tentu hal ini dapat meningkatkan penebangan pohon dan angka deforestasi di kawasan hutan Amazon Brasil. Kulminasi dari kebijakan-kebijakan di masa pemerintahan Bolsonaro berimplikasi pada meningkatnya aktivitas deforestasi. Selain disebabkan karena kepentingan bisnis untuk meningkatkan ekonomi negara, lemahnya penegakan hukum yang mengatur pengelolaan hutan Amazon menjadi pemicu utama meningkatnya aktivitas deforestasi di Brasil, khususnya di Amazon dan sekitarnya.



Sumber. Greenpeace-Underfire

²⁴ Greenpeace.

²⁵ Tine Ratna Poerwantika & Muhammad Isfandiar Hatami, "Deforestasi Amazon Pada Era Bolsonaro (2019)" dalam *International Journal of International Relations*, Vol. 5, No. 20 (2021), h. 184-217.

Fenomena deforestasi yang terjadi di Brasil telah merugikan dan mengorbankan hak-hak masyarakat adat. Hal ini dikarenakan Menurut The World Bank, masyarakat adat adalah kelompok sosial dan budaya yang berbeda yang memiliki ikatan leluhur secara kolektif dengan tanah dan sumber daya alam di dimana mereka tinggal, menempati atau dari mana mereka telah dipindahkan.²⁶ Tanah dan sumber daya alam tempat mereka bergantung tidak dapat dipisahkan dari identitas, budaya, mata pencaharian, serta kesejahteraan fisik dan spiritual mereka. Mereka sering mengandalkan pemimpin adat dan organisasi mereka untuk representasi yang berbeda atau terpisah dari masyarakat atau budaya arus utama. Banyak penduduk asli dari sebuah kelompok masyarakat adat masih mempertahankan bahasa yang berbeda dari bahasa resmi atau bahasa negara atau wilayah tempat mereka tinggal.

Sehingga aktivitas deforestasi seperti penebangan hutan dan pembakalan liar sering kali menggunakan, mengeksploitasi dan mengorbankan kawasan hutan dan tanah masyarakat adat yang menjadi penduduk asli di Amazon Brasil. Kondisi tentu berpengaruh signifikan pada makhluk hidup dan kehidupan sosial masyarakat adat, apalagi mayoritas penduduk asli atau masyarakat adat yang menetap di Amazon lebih banyak menggantungkan kebutuhan hidup mereka dari alam. Belum lagi masyarakat adat juga harus menghadapi ancaman pengusiran dari lahan mereka yang bersinggungan langsung dengan wilayah ekspansi modal atau wilayah yang menjadi tempat perluasan lahan. Masalahnya adalah masyarakat adat tidak ingin memisahkan dirinya dari alam sehingga menjadikan mereka melakukan resistensi untuk mempertahankan tanah mereka.

Akibatnya, resistensi yang dilakukan oleh masyarakat adat menyebabkan banyaknya munculnya tindakan intimidasi dan kekerasan terhadap mereka. Misalnya yang terjadi pada 28 Mei 2019, tim investigasi dari *Greenpeace* Brasil dan beberapa wartawan menyaksikan kejadian serangan bersenjata terhadap masyarakat adat *Geraizeiras do Alto Rio Preto* yang merupakan masyarakat adat

²⁶ The World Bank, "Indigenous People", dalam <https://www.worldbank.org>, diakses pada 22 Juni 2022.

yang di tinggal di sungai Preto Atas.²⁷ Kasus lainnya juga menimpa presiden komunitas *Cachoeiragenizeira* yang ditahan secara ilegal oleh anggota bersenjata Estrela Guía.²⁸ Berdasarkan dari *the Indigenous Missionary Council (CIMI)*, pada tahun 2019 terdapat peningkatan kasus sebanyak 16 dari 19 kategori yang mereka lacak dalam laporan mereka yang berjudul “*Violence Against Indigenous Peoples in Brazil*”.²⁹ Kategori mencakup invasi tanah, eksploitasi ilegal sumber daya dan kerusakan properti masyarakat adat, mengalami peningkatan kasus dari 109 yang terdaftar pada 2018 menjadi 256 kasus pada 2019 di setidaknya 151 tanah adat, yang berdampak pada 143 masyarakat, di 23 negara bagian.³⁰ Tercatat selama tahun pertama pemerintahan Bolsonaro terdapat 11 kasus pembunuhan dan merupakan jumlah terbesar dari pembunuhan terhadap pemimpin adat dalam kurun waktu 11 tahun terakhir.³¹ Penyebab utama terjadinya kekerasan ini yaitu lahan yang dijadikan sebagai pertambangan, diikuti oleh invasi dan penebangan liar.³² Dari 300 pembela Amazon Brasil yang dibunuh dalam dekade terakhir hanya 14 kasus yang diadili.

Peran APIB dalam mengatasi pelanggaran hak asasi manusia terhadap masyarakat adat Brasil akibat deforestasi melalui tiga cara. *Pertama*, APIB menginisiasi dan memobilisasi organisasi pribumi lainnya. *Kedua*, APIB membentuk Aliansi dan Koalisi dengan Organisasi Pribumi Negara Lain. *Ketiga*, APIB Menyediakan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Adat Brasil. Menginisiasi dan memobilisasi organisasi pribumi lainnya. Melalui Acampamento Terra Livre (ATL) APIB mobilisasi organisasi pribumi yang diadakan tiap tahun sejak 2004 untuk memperlihatkan situasi hak-hak adat dan menuntut agar pemerintah Brasil memenuhi tuntutan dan klaim masyarakat adat. Beberapa tuntutan APIB yaitu Persetujuan Statuta Baru untuk masyarakat adat; Persetujuan RUU yang

²⁷ Greenpeace.

²⁸ Greenpeace.

²⁹ Conselho Indigenista Missionario (CIMI). “In 2019, Indigenous Lands were Ostensibly Invaded from North to South of Brazil”, dalam <https://cimi.org.br/2020/09/in-2019-indigenous-lands-were-ostensibly-invaded-from-north-to-south-of-brazil/>, diakses pada 23 Juni 2022.

³⁰ CIMI .

³¹ Comissao Pastoral da Terra (CPT). “Conflicts in the Countryside in Brazil 2019 Report”, dalam <https://www.cptnacional.org.br>, diakses 23 Juni 2022.

³² CPT.

membentuk Dewan Nasional Kebijakan Pribumi (CNPI); Penolakan inisiatif legislatif anti-pribumi, yang berusaha membalikkan hak-hak yang dijamin oleh Konstitusi Federal 1988; Penerapan Konvensi 169 Organisasi Buruh Internasional (ILO) dan Deklarasi PBB tentang hak-hak masyarakat adat yang menjamin hak atas konsultasi yang bebas, didahulukan dan diinformasikan tentang segala hal yang mempengaruhi APIB; Memperjuangkan keadilan dengan melawan kekerasan dan kriminalisasi terhadap pemimpin dan masyarakat adat, sebagai akibat dari perebutan tanah.³³

Bahkan dalam advokasi Indigenous COP 26, Selama Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui COP 26, APIB menegaskan kepada dunia mengenai sentralitas masyarakat adat dan wilayahnya dalam menghadapi krisis iklim. Dalam konteks banyaknya ancaman terhadap masyarakat adat dan wilayah mereka akibat dari perubahan iklim, APIB juga akan berpartisipasi dalam COP 26 untuk menegaskan kepada dunia pentingnya jaminan demarkasi dan perlindungan tanah adat dalam perang melawan krisis iklim.

Kedua, APIB membentuk Aliansi dengan GATC (*The Global Alliance of Territorial Communities*). GATC adalah sebuah koalisi dari organisasi komunitas lokal dan pribumi dari Amerika Latin, Afrika dan Asia yang melindungi lebih dari 840 juta hektar hutan tropis.³⁴ Aliansi ini mewakili 35 juta orang di antara wilayah hutan di 24 negara yang dibentuk oleh AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara), AMPB (Aliansi Masyarakat dan Hutan Mesoamerika), COICA (Koordinator Organisasi Adat Lembah Amazon), APIB (Artikulasi Masyarakat Adat Brasil), dan REPALEAC (Jaringan Penduduk Asli dan Lokal untuk Pengelolaan Berkelanjutan Ekosistem Hutan Afrika Tengah).³⁵ Aliansi memimpin gerakan berorientasi pada komunitas yang menghasilkan solusi untuk mengatasi masalah iklim. Mereka mengadvokasi penghormatan terhadap hak dan penyertaan masyarakat hutan dalam negosiasi global tentang perubahan iklim, hutan dan keanekaragaman hayati. Semakin maraknya negara-negara di dunia

³³ <https://apiboficial.org>, diakses 23 Juni 2022.

³⁴ Guardianes del Bosques, "About – NCBS - Alianza Global de Comunidades Territoriales", dalam <https://alianzaglobal.me/ncb/>, diakses 23 Juni 2022.

³⁵ Guardianes del Bosques.

menghancurkan alam mendorong aliansi ini berjuang untuk melindungi bumi dari kerusakan alam. Terdapat banyak ancaman yang harus dihadapi saat ini seperti terus menyebarkan Covid-19 di wilayah hutan, pembalakan liar dan penambangan menghancurkan kawasan lindung dan laju deforestasi lebih tinggi dari sebelumnya.

Masyarakat adat dan lokal yang melindungi wilayah hutan menghadapi berbagai ancaman secara lokal, namun sebagian besar dari ancaman tersebut umum terjadi di tanah masyarakat adat. Hal ini menciptakan dampak buruk yang sama pada kehidupan, wilayah, dan spesies yang menghuninya. Oleh karena itu, aliansi ini memiliki 5 tuntutan mendasar yaitu pertama, hak-hak tanah: hak masyarakat adat dan masyarakat lokal atas tanah yang mereka tempati harus diakui. Kedua, setiap intervensi di wilayah mereka harus melalui proses persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan. Ketiga, dana langsung: mereka membutuhkan akses secara langsung terhadap pendanaan masalah iklim. Keempat, perlindungan hidup: para pemimpin mereka tidak boleh dikriminalisasi atau dibunuh. Kelima, pengetahuan tradisional mengacu pada semua kebijakan yang dikembangkan di wilayah mereka harus memperhitungkan pengetahuan tradisional yang mereka yakini dan pengetahuan tersebut perlu dimasukkan ke dalam strategi dalam menangani perubahan iklim.

Ketiga, APIB menyediakan bantuan hukum bagi masyarakat adat Brasil. Salah satu bentuk bantuan hukum yang dilakukan oleh APIB yaitu mengajukan pernyataan di hadapan Pengadilan Kejahatan Internasional, meminta penyelidikan atas dugaan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh Presiden Brasil Jair Bolsonaro. Tuntutan tersebut berpusat pada kebijakan sosial dan lingkungan secara sistematis dan anti-pribumi yang diberlakukan oleh Bolsonaro sejak masa jabatannya dimulai pada Januari 2019, diperparah selama pandemik Covid-19. APIB mengklaim bahwa pemerintah Bolsonaro telah secara sistematis merombak perlindungan sosial bagi masyarakat adat dan perlindungan lingkungan bagi wilayah mereka, berupa genosida dan ekosida. Penghapusan ini telah mengakibatkan peningkatan invasi ke tanah adat dan deforestasi, kebakaran, dan penambangan ilegal.

APIB juga menuduh Bolsonaro secara langsung mendorong serangan terhadap masyarakat adat. Bukti yang diajukan ke ICC terutama mencakup penolakan untuk membatasi tanah baru serta kebijakan dan perintah dengan tujuan untuk mendorong kegiatan invasif dan konflik di wilayah tanah adat.³⁶ Untuk mendukung klaim kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilayangkan terhadap Bolsonaro, APIB harus menetapkan berdasarkan Pasal 7 Statuta Roma bahwa kebijakan Bolsonaro merupakan serangan sistematis yang diarahkan pada masyarakat adat Brasil dengan efek pemusnahan, penganiayaan, atau tindakan tidak manusiawi yang menyebabkan cedera serius pada fisik dan mental. Sedangkan klaim APIB mengenai kejahatan genosida ditetapkan berdasarkan Pasal 6 yang berpusat pada kerusakan fisik dan mental yang serius yang dibuat untuk menghancurkan masyarakat adat.

Pada kasus lain, Eloy Terena adalah pengacara pribumi kedua yang berhasil mengajukan kasus ke Mahkamah Agung, dan yang pertama memenangkan gugatan yurisdiksi konstitusional sejak pembentukan Mahkamah tersebut. Keputusan Mahkamah Agung yang menandakan kemenangan bagi masyarakat adat Brasil dan kekalahan bagi pemerintahan Bolsonaro menjadi momen bersejarah bagi masyarakat adat Brasil. Bagi para pemimpin adat Ailton Krenak, gugatan tersebut merupakan titik balik dari sudut pandang sejarah hukum tentang hak-hak masyarakat adat, dan hak masyarakat adat untuk mewakili diri mereka sendiri dan tidak diwakili oleh FUNAI atau lembaga negara lainnya.

Dalam persidangan tersebut, Eloy Terena selaku pengacara APIB mengajukan banding ke Mahkamah Agung (STF)³⁷. Pada tanggal 5 Agustus, dalam persidangan bersejarah tersebut, STF memutuskan dalam suara bulat dari sembilan hakim bahwa pemerintah federal harus mengadopsi langkah-langkah untuk melindungi masyarakat adat selama pandemik.³⁸ Keputusan itu memenangkan gugatan yang diajukan oleh APIB dan membutuhkan

³⁶ APIB, “Unprecedented: APIB denounces Bolsonaro before the ICC, in The Hague, for indigenous genocide”, dalam <https://apiboficial.org/2021/08/09/unprecedented-apib-denounces-bolsonaro-before-the-icc-in-the-hague-for-indigenous-genocide/?lang=en>, diakses pada 23 Juni 2022.

³⁷ APIB & Amazon Watch, 2020.

³⁸ APIB & Amazon Watch, 2020.

pengembangan dan pemenuhan rencana penahanan untuk Covid-19. Namun terlepas dari keputusan yang menguntungkan, hakim tidak memerintahkan penarikan pemukiman ilegal yang menduduki tujuh tanah adat, tanah Yanomami di negara bagian Amazon dan Roraima, Karipuna dan Uru-Eu-Wau-Wau di Rondonia, dari Arariboia di Maranhao, dan Munduruku, Trincheira Bacaja, dan Kayapa di Para.³⁹ Pendudukan ilegal atas tanah-tanah ini membuat masyarakat adat menghadapi ancaman lebih jauh terhadap keselamatan mereka, ancaman yang diperparah oleh pandemi. Namun perampasan tanah, penambang, penebang, dan penjajah terus beroperasi tanpa hambatan di Amazon.

Kesimpulan

Peningkatan laju deforestasi di Brasil oleh kulminasi kebijakan-kebijakan Presiden Brasil Jair Bolsonaro telah menyebabkan kerusakan terhadap lingkungan, berpengaruh terhadap perubahan iklim dan pemanasan global, mengancam hak-hak masyarakat adat dan menimbulkan ancaman kekerasan yang harus dihadapi oleh masyarakat adat akibat perluasan tanah untuk kebutuhan bisnis dan agrikultural di masa pemerintahan Bolsonaro. Bahkan aktivitas deforestasi tersebut mengancam hak asasi manusia masyarakat adat untuk memperoleh hak-hak atas tanah dan wilayah mereka. Keterbatasan akses masyarakat adat terhadap pengambilan keputusan menghambat mereka dalam perolehan hak-hak sebagaimana yang tercantum dalam Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat dan Konvensi ILO No. 169. APIB yang diidentifikasi sebagai Masyarakat Sipil Global (*Global Civil Society*) di dengan beberapa indikator seperti, keterlibatannya dalam mengadvokasi isu-isu global seperti perjuangan atas hak asasi manusia, komunikasi lintas batas, memiliki representasi badan organisasi global, serta solidaritas tanpa mengenal batas teritorial menjadikan APIB sebagai Masyarakat Sipil Global yang dapat membantu kepentingan masyarakat adat di Brasil. Mengenai peran APIB dalam memperjuangkan dan mengadvokasi isu hak asasi manusia dilakukan dengan menyediakan bantuan hukum, mobilisasi organisasi pribumi serta membentuk

³⁹ APIB & Amazon Watch, 2020.

aliansi secara lintas batas negara. Hal ini dapat membantu mengartikulasikan hak-hak masyarakat adat atas tanah dan wilayah mereka.

Daftar Pustaka

Buku, Jurnal Artikel, Laporan Tahunan dan Dokumen Resmi

Anheier, H., Glasius, M., & Kaldor, Mary. “*Global Civil Society 2001*”, Oxford: Oxford University Press, 2001.

APIB & Amazon Watch. “Complicity in Destruction III: How Global Corporations Enable Violations of Indigenous Peoples’ Rights in the Brazilian Amazon”, dalam *annual report of APIB*, 2020.

Chandhoke, Neera. “The Limits of the Global Civil Society”, dalam *Global Civil Society Yearbook 2002*, diedit oleh Marlies Glasius, Mary Kaldor dan Helmut Anheier, Oxford: Oxford University Press, 2002, h. 35-53.

Emboava, Camila & Egan, Annika. “Old Power Struggles and New Media Work: Indigenous Peoples Striving for Justice in Contemporary Brazil”, Dalam J. Díaz-Pont et al (eds.), *The Local and the Digital in Environmental Communication* (New York: Palgrave Macmillan, 2020), h. 173.

Greenpeace, “*Under Fire*”, dalam https://www.greenpeace.org/static/planet4-internationalstateless/2020/04/86b5fe06-greenpeace_underfire_artwork_pages.pdf, diakses pada 22 Juni 2022.

Hallstrom, Emilia. “Indigenous Interest in International Trade Governance: A Case Study of APIB and the EU-Mercosur Trade Agreement”. *Tesis*. International Relations, Department of Global Political Studies Bachelor Program, Malmo University, 2021.

Jaysawal, Neelmani. “Civil Society, Democratic Space, and Social Work”, dalam *Sage Open*, Vol. 3, No. 4, (2013), h. 1-12.

Junior, Silva et al. “The Brazilian Amazon Deforestation Rate in 2020 is the Greatest of the Decade” dalam *In Nature Ecology and Evolution*, Vol. 5, No. 2 (2021), h. 144-145.

Kaldor, Mary. “The Idea of Global Civil Society”, dalam *International Affairs*, Vol. 79, No. 3, (2003), h. 583-593.

Kastrati, Adrian. "Civil Society from Historical to Contemporary Perspectives", dalam *European Journal of Multidisciplinary Studies*, Vol. 1, No. 1, h. 64-68.

Mas'oeed, Mohtar. "*Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi*", Jakarta: LP3ES, 1990.

Mora, Maryuri & Sofocles, Arquias. "Being a Leader, a Woman and Indigenous: Three Challenges, Three Barriers", dalam *International Journal on Human Rights*, Vol. 17, No. 30, (2020), h. 19-26.

Poerwantika, Tine Ratna & Hatami, Muhammad Isfandiar. "Deforestasi Amazon Pada Era Bolsonaro (2019)" dalam *International Journal of International Relations*, Vol. 5, No. 20 (2021), h. 184-217.

Scholte, Jan Aart. "Global Civil Society: Changing the World", dalam Working Paper, *Centre for the Study of Globalisation and Regionalisation (CSGR)*, (1999).

Sulistyo, Djoko. "*Metode Kualitatif dan Kuantitatif dalam Perkuliahan Analisis Hubungan Internasional*", Surabaya: Universitas Airlangga, 2015.

Internet

APIB. "About- APIB". dalam <https://apiboficial.org>, diakses pada 20 Juni 2022.

APIB. "Unprecedented: APIB denounces Bolsonaro before the ICC, in The Hague, for indigenous genocide", dalam <https://apiboficial.org/2021/08/09/unprecedented-apib-denounces-bolsonaro-before-the-icc-in-the-hague-for-indigenous-genocide/?lang=en>, diakses pada 23 Juni 2022.

Climate Alliance. "About-COICA" dalam <https://www.climatealliance.org/indigenous-partners/coica.html>, diakses pada 20 Juni 2022.

Comissao Pastoral da Terra (CPT). "Conflicts in the Countryside in Brazil 2019 Report", dalam <https://www.cptnacional.org.br>, diakses pada 23 Juni 2022

Conselho Indigenista Missionario (CIMI). "In 2019, Indigenous Lands were Ostensibly Invaded from North to South of Brazil", dalam <https://cimi.org.br/2020/09/in-2019-Indigenous-lands-were-ostensibly-invaded-from-north-to-south-of-brazil/>, diakses pada 23 Juni 2022.

Guardianes del Bosques. “About – NCBS - Alianza Global de Comunidades Territoriales”, dalam <https://alianzaglobal.me/ncb/>, diakses 23 Juni 2022.

The World Bank. “Indigenous People”, dalam <https://www.worldbank.org>, diakses pada 22 Juni 2022.

United Nation. “Indigenous Peoples and the United Nations Human Rights System”, dalam <https://www.ohchr.org>, diakses pada 22 Juni 2022.

United Nations. “Outwork-Human Rights” dalam <https://www.un.org/en/global-issues>, diakses pada 20 Juni 2022.

LAMPIRAN

Naspub 1 : Peran APIB
(Articulação Dos Povos
Indígenas Do Brasil) Dalam
Mengatasi Pelanggaran Hak
Asasi Manusia Akibat
Deforestasi Pada Masyarakat
Adat Di Brasil

by La Ode Kasbar

Submission date: 31-Oct-2022 02:08PM (UTC+0800)

Submission ID: 1940141876

File name: Naskah_Publikasi_La_Ode_Kasbar.docx (841.28K)

Word count: 5300

Character count: 35639

Naspub 1 : Peran APIB (Articulação Dos Povos Indígenas Do Brasil) Dalam Mengatasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia Akibat Deforestasi Pada Masyarakat Adat Di Brasil

ORIGINALITY REPORT

25% SIMILARITY INDEX	24% INTERNET SOURCES	9% PUBLICATIONS	14% STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------	------------------------------

PRIMARY SOURCES

1	journals.umkt.ac.id Internet Source	3%
2	pontianak.tribunnews.com Internet Source	1%
3	repository.ub.ac.id Internet Source	1%
4	journal.aihii.or.id Internet Source	1%
5	Submitted to University of East London Student Paper	1%
6	Submitted to University of Bedfordshire Student Paper	1%
7	ejournal.umm.ac.id Internet Source	1%
8	amazonwatch.org Internet Source	1%